

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan mesin cetak di Nusantara tidak lepas dari kedatangan bangsa Eropa dan masuknya agama Kristen. Mesin cetak pertama di Nusantara didatangkan oleh para zending Gereja pada tahun 1624.¹ Mesin cetak ini digunakan untuk menunjang kegiatan para zendeling dan kepentingan Gereja di Nusantara melalui pencetakan brosur, pamflet, serta alkitab. Sementara itu, pemerintahan *Vereeniging Oost-Indische Compagnie* (VOC) baru mulai menggunakan mesin cetak pada tahun 1667, walaupun dalam proses percetakan belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Pada saat itu VOC menggunakan jasa perusahaan percetakan untuk mencetak naskah Perjanjian Bongaya, sebuah perjanjian perdamaian yang dibuat untuk mengakhiri perang antara VOC dan Kerajaan Gowa.² Antara tahun 1659 hingga 1670 tercatat telah terdapat setidaknya 6 buah mesin cetak di Batavia yang dikenal sebagai *Stadsdrukker* atau ‘Penerbit Kota’.³

Maraknya korupsi di kalangan pejabat dan semakin meningkatnya hutang perusahaan yang digunakan untuk menutupi kerugian perdagangan membawa

¹ Miftahul Habib Fachrurozi, “Pers dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia pada Awal Abad XX” *ISTORIA*, Vol. 12 (2), 2017, hlm. 24

² Fachrurozi, “Pers dan Bangkitnya ...”, hlm. 24

³ Kasijanto, “Media dan Monopoli Dagang; Percetakan dan Penerbitan di Indonesia pada Masa VOC” *WACANA*, Vol. 10 (2), 2008, hlm.291

VOC pada akhirnya.⁴ Pada 1799, VOC dinyatakan bangkrut dan semua posesinya diambil alih oleh negara. Pergantian kekuasaan ke tangan pemerintah Kerajaan Belanda ini menandai era baru dalam perkembangan negara kolonial. Pada awal abad ke-19, industri percetakan masih didominasi oleh hasil-hasil terbitan gereja serta pemerintah kolonial. Baru pada pertengahan hingga akhir abad ke-19 terjadi pergeseran penguasaan, dimana pengusaha-pengusaha percetakan swasta mulai banyak menerbitkan surat kabar-surat kabar mereka sendiri. Surat kabar milik pengusaha cetak seperti J. W. Bruining yang menerbitkan *Bataviasche Advertentieblad* pada 1851, Coenraad Busken yang menerbitkan *Het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indie* pada 1851, dan Herman de Groot yang menerbitkan *Semarangsche Nieuws en Advertentieblad* pada 1852 menjadi beberapa contoh dari perkembangan perusahaan percetakan dan penerbitan swasta di masa ini.⁵

Pada pertengahan hingga akhir abad ke-19 ini juga terjadi perluasan usaha percetakan surat kabar ke beberapa tempat. Jika sebelumnya kegiatan percetakan surat kabar banyak terkonsentrasi di pulau Jawa, maka mulai dari pertengahan abad ke-19 ini kegiatan percetakan surat kabar mulai dibuka di beberapa wilayah di luar Jawa. Pada 1859 di Padang telah terbit surat kabar *Padangsch Nieuwsen Advertentieblad* yang kemudian berubah nama menjadi *Sumatera Courant* pada 1862. Di Makassar muncul surat kabar *Makassaarsch Weekblad* yang memulai

⁴ Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia: Kemunculan Penjajahan di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010) hlm. 52

⁵ Danil Mahmud Chaniago dan Umi Rasmiani Umairah, "Sejarah Pers Kolonial di Indonesia" *Khazanah*, Vol. 08 (16), 2018, hlm. 32-33

penrbitannya pada 1861. Sementara di Palembang muncul *Nieuws en Advertentie Blaad voor de Residentie Palembang* pada 1898.⁶

Di Makassar, keberadaan perusahaan percetakan tidak lepas dari perkembangan pers. Pada 1861, seorang pengusaha dan pencetak buku bernama W. Eekhout telah mendirikan *W. Eekhout & Co.*, sebuah perusahaan percetakan yang digunakan untuk mencetak surat kabar berbahasa Belanda *Makassaarsch Weekblad*. Selain menerbitkan *Makassaarsch Weekblad*, Eekhout juga melakukan percetakan dan penerbitan surat kabar berbahasa melayu yang dikenal sebagai *Mata-Hari* dan juga beberapa buku sastra Melayu seperti *Pantoon Melajoe serta Tjerita- Tjerita segala roepa poor Orang jang soeka ketawa*. Perusahaan *W. Eekhout & Co.* ini menjadi salah satu perusahaan percetakan awal yang berkembang di Kota Makassar. Hingga akhir abad ke-19, industri percetakan dan penerbitan surat kabar di Kota Makassar hanya diisi oleh satu atau dua perusahaan saja. Baru pada abad ke-20 perusahaan percetakan lain mulai bermunculan dan mengisi industri percetakan dan pers di Makassar.

Memasuki awal abad ke-20, muncul dua perusahaan percetakan baru, *N. V. Handelsdrukkerij & Kantoorhandel Celebes* dan *Brouwer & Co.* Sama seperti perusahaan percetakan Eekhout yang bermula dari percetakan dan penerbitan surat kabar, percetakan *N. V. Handelsdrukkerij & Kantorhandel Celebes* atau *Celebes*

⁶ Bambang Trimansyah, *Sejarah Perbukuan: Kronik Perbukuan Indonesia Melewati Tiga Zaman*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, 2022) hlm. 33

Drukkerij didirikan untuk mencetak surat kabar *Pemberita Makassar*.⁷ Perusahaan ini didirikan pada 1903 melalui pendanaan dari 23 pemegang *aandel* dengan modal *f* 30.000. Sementara itu, *Brouwer & Co.* didirikan satu tahun kemudian pada 1904 dan dengan cepat menjadi pesaing dari *Celebes Drukkerij* dengan penerbitan surat kabar berbahasa Melayu lain di Kota Makassar dengan nama *Sinar Matahari*. Sementara itu percetakan lain seperti *Tiong Hua Drukkerij*, *Volksdrukkerij*, dan *Apollo Drukkerij* baru beroperasi sekitar akhir dekade 1910-an dan awal dekade 1920-an

Namun kondisi ini berubah memasuki pertengahan dekade 1930-an. Nama-nama perusahaan percetakan di Kota Makassar mulai semakin jarang disebutkan dan kemudian menghilang. Hanya terdapat satu perusahaan percetakan yang masih terus muncul dalam pemberitaan, yakni *Celebes Drukkerij. N. V. Handelsdrukkerij & Kantorhandel Celebes* terus memproduksi surat kabar dan dokumen-dokumen lain hingga akhir masa pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1942.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merumuskan 2 permasalahan yang menjadi poin pembahasan dari tulisan ini. Pertama adalah bagaimana perusahaan percetakan di Makassar berkembang pada awal abad ke-20. Kedua adalah mengapa hanya perusahaan percetakan *N. V. Handelsdrukkerij & Kantorhandel Celebes* yang bisa bertahan hingga tahun 1942, sedangkan beberapa perusahaan percetakan lain tidak.

⁷ Yerry Wirawan, “Pers Tinghoa Makassar Sebelum Perang Dunia Kedua” *Archipel*, Vol. 82, 2011, hlm. 52

1.2. Rumusan Masalah

Untuk menjawab persoalan-persoalan di atas maka diperlukan beberapa rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian:

- a. Bagaimana perkembangan perusahaan percetakan di Kota Makassar pada awal abad ke-20?
- b. Mengapa perusahaan percetakan *N. V. Handelsdrukkerij & Kantorhandel Celebes* bisa bertahan hingga tahun 1942?

1.3. Batasan Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai perusahaan percetakan *N. V. Handelsdrukkerij & Kantorhandel Celebes* yang beroperasi di Kota Makassar mulai dari tahun 1903 hingga 1942. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengambil batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian kedepannya sehingga pembahasan dapat terfokus. Adapun batasan masalah sebagai berikut:

a. Batasan Temporal

Secara temporal penulisan ini berfokus pada masa berdirinya perusahaan percetakan *N. V. Handelsdrukkerij & Kantorhandel Celebes* dari 1903 hingga ditutupnya perusahaan seiring dengan datangnya Jepang ke Hindia Belanda pada 1942. Periode ini juga diambil karena mencakup perkembangan berbagai perusahaan percetakan lain di Kota Makassar.

b. Batasan Spasial

Batasan spasial penelitian ini terletak pada Kota Makassar, salah satu kota kolonial besar pada awal abad ke-20. Fokusnya adalah pada perkembangan

perusahaan percetakan *N. V. Handelsdrukkerij & Kantoorhandel Celebes* serta perusahaan percetakan lain di kawasan Kota Makassar selama periode 1903-1942.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui perkembangan perusahaan percetakan di Kota Makassar pada awal abad ke-20.
- b. Mengetahui alasan mengapa perusahaan percetakan *N. V. Handelsdrukkerij & Kantorhandel Celebes* bisa bertahan hingga tahun 1942.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.
- b. Sebagai literatur untuk menambah referensi tentang perkembangan perusahaan percetakan di Kota Makassar pada awal abad ke-20.
- c. Menambah pengetahuan mengenai alasan mengapa perusahaan percetakan *N. V. Handelsdrukkerij & Kantorhandel Celebes* bisa bertahan hingga tahun 1942.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai perusahaan percetakan masih belum banyak dilakukan hingga saat ini. Hanya terdapat beberapa literatur yang membahas mengenai perusahaan maupun kegiatan percetakan baik di Indonesia secara luas maupun di Kota Makassar secara khusus. Salah satu penelitian dengan subjek percetakan ini adalah tulisan dari Kasijanto yang berjudul “Media dan Monopoli Dagang

Percetakan dan Penerbitan di Indonesia pada Masa VOC”. Sesuai dengan namanya, artikel jurnal ini membahas mengenai percetakan dan penerbitan yang ada pada masa VOC. Pembahasannya berfokus pada usaha dari VOC untuk mengatur dan memperkuat cengkramannya terhadap industri percetakan di Batavia. Hal ini tentunya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang mencoba melihat perkembangan yang terjadi dalam dunia percetakan di Kota Makassar.

Tulisan lainnya yang memiliki topik pembahasan yang hampir sama dengan tema yang dipilih adalah artikel jurnal milik Yerry Wirawan dengan judul “Pers Tionghoa Makassar Sebelum Perang Dunia Kedua”. Artikel ini membahas mengenai pers Tionghoa di Kota Makassar sebelum Perang Dunia Kedua dimulai. Fokus penelitiannya terletak pada surat kabar-surat kabar yang diterbitkan oleh orang Tionghoa dan hal-hal disekitarnya. Pembahasan berada pada permasalahan seputar peliputan orang-orang Tionghoa dalam surat kabar, berbagai macam surat kabar-surat kabar Tionghoa yang terbit, tokoh-tokoh pers Tionghoa, perdebatan mengenai penggunaan bahasa dalam surat kabar, serta perdebatan antara organisasi Tionghoa dalam surat kabar. Percetakan tidak menjadi pembahasan utama di dalam artikel tersebut walaupun disebutkan beberapa kali. Oleh karenanya, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak sama dengan artikel diatas.

Terdapat juga tulisan dari Danil M. Chaniago dan Umi R. Umairah yang berjudul “Sejarah Pers Kolonial Indonesia”. Artikel ini membahas mengenai sejarah pers kolonial di Hindia Belanda, terutama media pers berbahasa Melayu dan daerah. Media tersebut mendukung kebijakan kolonial, mempengaruhi penduduk

bumiputera, dan memainkan peran dalam proses pemersatuan bangsa Indonesia. Permasalahan mengenai percetakan hanya dibahas pada bagian awal saja, terutama dalam konteks masuknya alat percetakan di masa VOC. Berbeda dengan penelitian nantinya yang akan berfokus pada percetakan di masa kolonial abad ke-20.

Artikel selanjutnya adalah tulisan dari Miftahul H. Facrurozi yang berjudul “Pers dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia pada Awal Abad XX”. Artikel ini sesuai dengan judulnya membahas perkembangan awal pers di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan peranannya dalam bangkitnya kesadaran nasional Indonesia. Dalam artikel ini, disebutkan bahwa pers pada awal abad ke-20 dipengaruhi oleh kebijakan Politik Etis dan kapitalisme cetak, yang memungkinkan tersebarnya kesadaran nasional Indonesia. Surat kabar seperti Bintang Hindia dan Medan Prijaji memainkan peran penting dalam menyebarluaskan wacana kemajuan dan kritik terhadap pemerintah kolonial. Walaupun banyak membahas mengenai surat kabar, tulisan Fachrurozi ini juga menyinggung peran dari kapitalisme cetak yang menyebabkan banyak percetakan untuk muncul dan memproduksi dalam jumlah yang masif.

Selain artikel jurnal, penulis juga menggunakan beberapa buku sebagai bahan acuan penelitian. Salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Bambang Trimansyah dengan judul “Sejarah Perbukuan: Kronik Perbukuan Indonesia Melewati Tiga Zaman”. Buku ini membahas mengenai dunia perbukuan sejak datangnya orang-orang Eropa ke Nusantara, masa Hindia Belanda, masa Jepang, masa Kemerdekaan hingga Pasca-Reformasi. Walaupun banyak dibahas mengenai percetakan dan penerbitan, kebanyakan pembahasan tersebut berfokus pada

penerbit dan percetakan di Jawa dan sebagian Sumatera. Daerah seperti Makassar atau bahkan Sulawesi tidak banyak disinggung di dalamnya terutama pada pembahasan masa kolonial Hindia Belanda. Oleh karenanya, penulis melihat bahwa penelitian yang akan dilakukan ini dapat melengkapi informasi tersebut.

Buku yang berjudul “Boekhandel Tan Khoen Swie Kediri: Agen Kebudayaan Jawa, 1915-1963” karya Wisnu menjadi salah satu bacaan rujukan penulis. Buku ini membahas mengenai sebuah toko buku milik seorang Cina bernama Tan Khoen Swie yang berada di Kediri. Pada awalnya toko ini hanya menjual buku-buku yang dicetak dan diterbitkan oleh pihak lain seperti *Volkslectuur* (Balai Pustaka), namun dalam perkembangannya muncul ide untuk mencetak dan menerbitkan buku dan bahan bacaan sendiri oleh sang pemilik. Walaupun focus pembahasan berada pada toko bukunya sendiri, bab 2 dari buku ini menjelaskan mengenai kondisi dunia percetakan dan penerbitan di Jawa pada awal abad ke-20. Hal ini menjadi salah satu rujukan yang bisa penulis pakai untuk melihat kondisi dunia percetakan dan penerbitan di Makassar pada kurun waktu yang kurang lebih sama.

Buku milik Yerry Wirawan yang berjudul “Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar dari Abad ke-17 hingga ke-20” juga menjadi salah satu bahan bacaan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Buku milik Yerry Wirawan ini membahas mengenai masyarakat Tionghoa di Kota Makassar, baik dari sisi pertumbuhan dan migrasinya, peran mereka di berbagai bidang terutama perdagangan, kehidupan sosial dan budaya, hingga integrasi mereka. Dalam Bab 3 bagian Sub-Bab 4, Yerry Wirawan kembali membahas keikutsertaan orang-orang Tionghoa dalam dunia pers. Dalam sub-bab tersebut, dibahas kembali mengenai

surat kabar-surat kabar serta para wartawan Tionghoa. Sama seperti artikel jurnalnya, bagian sub-bab dari buku Yerry Wirawan ini tidak memfokuskan pembahasannya pada kegiatan percetakan, melainkan berfokus pada surat kabar-surat kabar yang diterbitkan oleh orang-orang Tionghoa serta relasi orang-orang Tionghoa dalam dunia pers.

Terdapat pula tesis milik Ahmat B. Adam berjudul "*The Vernacular Press and The Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)*" yang dipublikasi pada 1984. Tesis tersebut membahas mengenai pers berbahasa lokal yang muncul di Hindia Belanda sejak 1855 hingga 1913. Adam membagi pembahasan tesisnya menjadi 4 bagian. Bagian pertama berfokus pada pembahasan masuknya percetakan di Hindia Belanda, kondisi sosial dan pendidikan masyarakat, kebijakan pemerintah, serta penggunaan bahasa. Sementara itu bagian kedua, ketiga, dan keempat membahas mengenai berbagai surat kabar berbahasa lokal milik orang-orang Eropa, Tionghoa, dan Bumiputra. Tesis ini menjadi salah satu bahan bacaan utama yang digunakan oleh penulis untuk memahami kondisi industri pers dan percetakan di Hindia Belanda pada abad ke-19. Meski begitu, pembahasannya yang masih banyak berfokus pada pers di Jawa dan Sumatra, serta periode pembahasan dari 1855 hingga 1913 menjadikan penelitian Ahmat B. Adam berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.

1.6.2. Landasan Konseptual

Perkembangan. Perkembangan dalam sejarah merujuk pada proses evolusi atau pertumbuhan suatu entitas, fenomena, atau peristiwa sepanjang waktu tertentu. Dalam konteks penelitian sejarah, perkembangan sering kali merujuk pada

perubahan yang terjadi dalam struktur, fungsi, atau karakteristik suatu entitas atau fenomena, yang dapat diamati dan dianalisis melalui catatan-catatan historis, sumber-sumber primer, dan penelitian sejarah yang mendalam. Perkembangan ini dapat melibatkan perubahan politik, sosial, ekonomi, budaya, teknologi, atau lingkungan, serta interaksi kompleks antara faktor-faktor tersebut.⁸ Penelitian tentang perkembangan dalam sejarah bertujuan untuk memahami dinamika dan pola-pola perubahan seiring waktu, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan tujuan membawa pemahaman yang lebih dalam tentang masa lalu dan implikasinya terhadap kondisi saat ini.

Perusahaan. Perusahaan, dalam konteks ekonomi, merupakan entitas bisnis atau badan hukum yang dibentuk untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi, atau pelayanan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang terdiri dari sekelompok individu atau entitas yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, yang dapat berupa menghasilkan barang atau jasa, memenuhi kebutuhan pasar, atau mencapai pertumbuhan dan keuntungan finansial. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang berbunyi: “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara

⁸ Yussi Martha & dkk, “Konsep Dasar Sejarah: Implementasinya dalam Pembelajaran” *Bersatu*, Vol. 1 (4), 2023, hlm. 165

Republik Indonesia”.

Percetakan. Percetakan, dalam konteks sejarah dan industri, merujuk pada proses produksi massal dokumen, publikasi, atau materi cetak lainnya menggunakan teknik cetak, seperti cetak offset, cetak tinta, atau cetak digital.⁹ Secara tradisional, percetakan melibatkan penggunaan cetakan fisik, seperti plat logam atau blok kayu, yang digunakan untuk mentransfer gambar atau teks ke media cetak, seperti kertas atau kain. Percetakan memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi, ide, dan karya-karya sastra serta seni, serta memfasilitasi pertukaran budaya dan pengetahuan di antara masyarakat. Seiring perkembangan teknologi dan media digital, percetakan telah mengalami transformasi signifikan, mengadopsi metode produksi yang lebih efisien dan fleksibel, sambil tetap mempertahankan peranannya sebagai salah satu alat utama dalam menyebarkan informasi dan kebudayaan.

1.7. Metode Penelitian

Perumusan Masalah

Dalam tahapan ini penulis berusaha mencari permasalahan yang akan diteliti. Dalam mencari permasalahan tersebut penulis mencoba membaca beberapa sumber referensi baik itu dalam bentuk tulisan artikel jurnal dan buku ataupun dalam bentuk arsip seperti surat kabar. Setelah membaca beberapa sumber referensi penulis kemudian merumuskan masalah dan mengambil topik yang akan diteliti.

Pengumpulan Sumber

⁹ Zulkarnain Hamson, *Pers Dalam Lintasan Peradaban*, (Makassar: Tohar Media, 2019) hlm. 78

Pada tahapan ini penulis melakukan pengumpulan sumber primer dan sekunder. Dalam pengumpulan sumber primer penulis melakukan pencarian sumber primer melalui beberapa website penyedia katalog dan arsip digital seperti Dhelper.nl, Opac.perpusnas.go.id, dan Khastara.perpusnas.go.id. Penulis juga kemudian melakukan kunjungan ke koleksi surat kabar langka yang tersimpan di Perpustakaan Nasional untuk membaca koleksi arsip surat kabar yang tidak tersedia secara online dalam website yang disebutkan sebelumnya. Sementara untuk sumber-sumber sekunder, penulis menggunakan buku, jurnal, dan tesis yang diakses melalui internet, Perpustakaan Nasional Indonesia, dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Kritik Sumber

Pada tahapan ini peneliti harus memastikan setiap sumber yang terkumpul bersifat valid dan sesuai subjek yang diteliti. Kritik sumber merupakan proses penyaringan secara kritis untuk menguji kebenaran ataupun keaslian dari sumber sejarah. Kritik sumber yang digunakan terdiri dari 2 yakni kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal dilakukan sebagai usaha untuk mengetahui bahwa dokumen yang diperoleh dapat dipercaya atau tidak. Kritik eksternal dilakukan sebagai usaha pemeriksaan dari segi fisik, bahan, dan waktu pembuatan sumber. Sehingga, penulis dapat mengetahui keaslian sumber yang telah diperoleh.

Interpretasi

Interpretasi adalah proses menganalisis dan menafsirkan sumber sejarah. Pada tahap ini penulis berusaha menafsirkan dan menghubungkan fakta-fakta dari sumber yang telah dikumpulkan secara kronologis kemudian direkonstruksi

menjadi sebuah kesimpulan.

Penulisan Hasil

Penulisan hasil adalah tahap akhir dari penelitian sejarah, pada tahap ini penulis menarasikan hasil analisis dari semua tahap yang telah dilewati dengan cara menyajikan hasil penelitian yang baik sebagai tulisan sejarah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menuliskan hasil data yang telah dikumpulkan sesuai dengan judul yang diambil.

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I, sebagai bab pendahuluan yang terbagi atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II, membahas mengenai perkembangan perusahaan percetakan di Hindia Belanda hingga abad ke-19 serta modernitas Kota Makassar pada awal abad ke-20

BAB III, membahas mengenai industri percetakan dan surat kabar yang muncul di Kota Makassar hingga tahun 1942

BAB IV, membahas mengenai perusahaan percetakan *N. V. Handelsdrukkerij & Kantorohandel Celebes*

BAB V, merupakan penjabaran dari Bab I sampai Bab IV yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan dari seluruh pembahasan. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari berbagai rumusan permasalahan yang telah diajukan sekaligus menjadi penutup dalam penelitian ini.

BAB II

INDUSTRI PERCETAKAN DI HINDIA BELANDA HINGGA AKHIR ABAD KE-19 DAN MODERNITAS KOTA MAKASSAR AWAL ABAD KE-20

Dalam Bab II akan dijelaskan dua poin utama pembahasan. Bagian pertama membahas perkembangan industri percetakan di Hindia Belanda sejak diperkenalkannya teknologi mesin cetak hingga menjelang abad ke-20. Pembahasan ini mencakup proses penyebaran percetakan, peran zending dan pemerintah kolonial, kemunculan penerbitan swasta, serta regulasi yang memengaruhi dunia pers dan percetakan. Dengan melihat perkembangan industri percetakan sejak pertama masuknya mesin cetak pada 1624 hingga akhir abad ke-19, maka dapat terlihat bagaimana teknologi, jaringan distribusi informasi, serta kegiatan percetakan dan penerbitan terbentuk di Hindia Belanda, yang kelak menjadi dasar berkembangnya media cetak di berbagai daerah termasuk Makassar pada awal abad ke-20.

Bagian kedua mengalihkan fokus pada modernitas Kota Makassar di awal abad ke-20 sebagai salah satu pusat penting di kawasan Timur Hindia Belanda. Modernitas merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kota-kota di abad ke-20. Perubahan besar yang dibawa oleh Revolusi Industri, terutama dalam bidang teknologi dan inovasi, telah menciptakan transformasi dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di wilayah Hindia Belanda. Kota-kota yang menjadi pusat industrialisasi dan aktivitas masyarakat mengalami perubahan wajah yang signifikan. Transformasi kota ini terlihat dari pembangunan infrastruktur modern,

pembentukan pemerintahan kota, pengaturan tata ruang, dan pertumbuhan fasilitas publik.

Namun modernitas tidak hanya terwujud dalam teknologi dan tampilan fisik kota, tetapi juga dalam cara masyarakat membentuk kesadaran sosial yang baru. Koneksi antarindividu tidak lagi terbatas pada ikatan keluarga atau kedekatan geografis, melainkan mulai terbangun melalui afiliasi ideologis, pendidikan, dan profesi. Pembangunan institusi pendidikan di berbagai daerah telah melahirkan generasi baru yang lebih kritis, terdidik, dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial serta politik. Dalam konteks ini, pers dan percetakan memainkan peran sentral sebagai wadah penyebaran ide dan arena perdebatan pemikiran. Surat kabar dan majalah yang diterbitkan di kota-kota besar Hindia Belanda menjadi media utama untuk mengartikulasikan suara-suara dari berbagai kelompok masyarakat, baik itu nasionalis, agamis, liberal, maupun kelompok etnis tertentu, yang masing-masing memiliki agenda dan visi masa depan tersendiri. Perkembangan Makassar sebagai kota modern menyediakan lingkungan yang ideal bagi tumbuhnya industri pers dan percetakan lokal, yang akan menjadi fokus pembahasan lebih lanjut pada bab berikutnya.

2.1. Perkembangan Industri Percetakan di Hindia Belanda Hingga Akhir Abad Ke-19

Percetakan dalam pemahaman modern seperti saat ini dapat ditelusuri perkembangan akarnya pada sosok Johannes Gutenberg yang mempopulerkan mesin cetak press huruf lepas yang dikenal sebagai mesin Gutenberg pada 1450 di

Mainz, Jerman.¹⁰ Mesin cetak press ini memberikan cara untuk memproduksi buku-buku dengan lebih cepat dan hemat ketimbang dengan menyalin ulang buku-buku tersebut menggunakan tangan. Sebagai hasilnya harga buku-buku yang dicetak tersebut menurun sehingga akses terhadap informasi-informasi di dalamnya dapat menyebar dengan lebih luas daripada sebelumnya. Dalam kurun waktu 100 tahun sejak diperkenalkan, hasil produksi cetak press telah mencapai sekitar 20 juta unit yang tersebar di berbagai daerah serta bahasa seperti Jerman, Inggris, Prancis, Italia dan Belanda.¹¹

Masa kolonialisme kemudian menyebabkan teknologi-teknologi percetakan dibawa oleh negara-negara Eropa ke koloni-koloni mereka baik untuk tujuan penyebaran agama maupun untuk pencetakan administrasi pemerintahan kolonial. Di India, teknologi percetakan dibawa oleh seorang misionaris dari Serikat Yesuit (*Jesuit Order*) bernama Juan de Bustamante yang mendirikan percetakan huruf lepas pertama pada 1556 di Goa.¹² Di Filipina teknologi percetakan masuk seiring dengan upaya misionaris Spanyol untuk menyebarkan agama Kristen di kalangan penduduk lokal. Buku *De Doctrina Cristiana* telah dicetak menggunakan bahasa

¹⁰ Rochelle Forrester, "History of Printing – From Gutenberg to Laser Printer" *SSRN*, 2020, hlm. 03. Mesin cetak huruf lepas sendiri telah dikenal di Cina dan kemudian Korea sejak abad ke-11 M. Namun dikarenakan banyaknya karakter huruf dalam bahasa Cina, penggunaannya menjadi terbatas dan tidak seluas mesin cetak huruf lepas Gutenberg (lihat Shelton A. Gunaratne, "Paper, Printing, and The Printing Press" *Gazette*, Vol. 63 (6), 2001, hlm. 467).

¹¹ Yuyun Sunesti, "Media and Modernity: The Role of The Printing Press in The Modernization of Western Society" *Komunika*, Vol. 5 (2), 2011, hlm. 294

¹² Jose Kalamara, "India Inscribed: Development of Printing Technology in India, 16-18th Century" *The Proceedings of the Indian History Congress*, Vol. 68 (1), 2007, hlm. 440

Spanyol-Tagalog dan Tionghoa pada 1593 untuk memudahkan upaya pengkonversian.¹³ Hal yang sama juga terjadi di Hindia Belanda, dimana teknologi percetakan dibawa pertama kali oleh para zending Belanda untuk menyebarkan agama ke penduduk lokal.

2.1.1. Industri Percetakan Awal Pada Masa VOC

Mesin cetak press pertama kali dibawa oleh Zending Gereja Protestan Reformis Belanda pada 1624 ke Nusantara untuk menunjang kegiatan gereja melalui pencetakan brosur, almanak, buku, dan media cetak lainnya.¹⁴ Meski begitu, hasil cetak paling awal yang dapat ditelusuri baru bisa ditemukan pada 1659 dengan pencetakan dan penerbitan *Tijdboek* oleh seorang zendeling bernama Kornelis Pijl.¹⁵ Kegiatan percetakan kemudian mulai bertambah dengan munculnya rumah cetak baru diluar kepemilikan gereja. Pada 1667, VOC mengimpor mesin cetak langsung dari Belanda guna mencetak dokumen administrasi kompeni. Namun, dikarenakan kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan mesin cetak maka satu tahun kemudian mesin tersebut dikontrakkan selama 3 tahun kepada Hendrik Brants yang kemudian mendirikan rumah cetak yang dikenal sebagai Percetakan Kota (*Stadsdrukker*).¹⁶ Seiring dengan penandatanganan kontrak percetakan, VOC juga

¹³ Gracie Lee, "Early Printing in the Philippines" *Biblioasia*, Vol. 17 (2), 2021, hlm. 23

¹⁴ Kasijanto, "Media dan Monopoli Dagang", hlm. 290-291

¹⁵ Chaniago & Umairah, "Sejarah Pers Kolonial", hlm. 28

¹⁶ Kasijanto, "Media dan Monopoli Dagang....", hlm. 291. Salah satu hasil cetak pertama dari rumah cetak milik Hendrik Brants ini adalah naskah Perjanjian Bungaya, yang terdiri atas 13 halaman cetak yang memuat kesepakatan perdamaian antara Cornelis Speelman dan Sultan Hasanuddin (lihat Chaniago & Umairah, 2018:29).

kemudian mendirikan jabatan “Petugas Sensor”¹⁷ yang berperan untuk mengawasi hasil cetak dan publikasi yang diterbitkan oleh percetakan di wilayahnya. Baru pada 1719 pemerintah VOC mendirikan unit percetakannya sendiri yang dikenal sebagai Percetakan Istana (*Kasteeldrukker*) untuk membantu kegiatan administrasi kompeni tanpa campur tangan pihak luar.¹⁸

Pada 1744 dibawah wewenang Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, seorang pegawai VOC bernama Jan Erdmans Jorden mendapatkan izin menggunakan rumah cetak VOC untuk menerbitkan surat kabar pertama di Hindia Belanda yang dikenal sebagai *Bataviasche Nouvelles*.¹⁹ Surat kabar tersebut hanya bertahan selama 2 tahun saja, sebelum kemudian diberhentikan atas perintah dari *Heeren Zeventien* yang khawatir mengenai informasi di dalamnya yang dapat membahayakan monopoli VOC.²⁰ Hal ini menjadi salah satu bentuk dari pengetatan kontrol VOC terhadap praktik percetakan yang terus bertahan hingga akhir masa kekuasaannya. Tiga dekade setelah penutupan *Bataviasche Nouvelles*, surat kabar

¹⁷ Melalui Petugas Sensor, segala hasil cetak yang dinilai oleh VOC bertentangan dengan moral dan dapat menimbulkan skandal dikalangan pegawai perusahaan akan disita dan kemudian dibakar (Trimansyah, 2022:26).

¹⁸ Dengan pendirian Percetakan Istana ini maka Percetakan Kota yang tadinya mencetak dokumen-dokumen pemerintahan hanya diizinkan untuk mencetak dokumen-dokumen pribadi, sementara segala urusan yang berhubungan dengan pemerintahan dipindahkan ke Percetakan Istana (Kasijanto, 2008:292).

¹⁹ Trimansyah, *Sejarah Perbukuan.....*, hlm. 27

²⁰ Persaingan perdagangan antara Belanda, Inggris, Portugis, dan Spanyol serta ekspansi VOC ke berbagai daerah di Nusantara menjadikan informasi mengenai kegiatan perusahaan, kedatangan kapal dan kargo, serta kegiatan para pejabat VOC yang seringkali dimuat di dalam *Bataiasch Nouvelles* menjadi suatu hal yang perlu dirahasiakan menurut *Hereen Zeventien* (lihat Trimansyah, 2022:39 dan Chaniago & Umairah, 2018:30).

baru kemudian diterbitkan kembali. *Het Viendu Niews* merupakan sebuah mingguan yang terbit sejak 1776. Berbeda dengan *Bataviasche Nouvelles*, isi *Viendu Nieuws* ini didominasi oleh iklan barang lelang serta beberapa penjualan lahan. Oleh karenanya surat kabar ini dianggap tidak membahayakan urusan pemerintah, meskipun tetap mengalami penyensoran yang ketat, dan terus diterbitkan hingga masa akhir VOC pada 1799.²¹

2.1.2. Percetakan dan Penyebaran Pers Hingga Akhir Abad Ke-19

Pada 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bangkrut dan segala aset-aset yang ia miliki diambil alih oleh pemerintah Belanda, termasuk unit-unit percetakan. Pemerintahan baru didirikan dibekas wilayah VOC yang kemudian dikenal sebagai Hindia Belanda. Dalam dua dekade awal berdirinya, wilayah jajahan ini telah mengalami pergantian pemerintahan setidaknya tiga kali akibat kondisi Eropa yang sedang dilanda perang. Pada 1809, dibawah pimpinan Herman William Daendels, Gubernur Jenderal utusan Republik Bataaf di Hindia Belanda, Percetakan Kota dan Percetakan Istana digabungkan menjadi satu rumah percetakan besar yang dikenal sebagai *Landsdrukker* yang menjadi cikal bakal dari Percetakan Negara.²² Percetakan ini kemudian digunakan oleh Daendels untuk menyebarkan propaganda mengenai reformasi administrasi yang ia lakukan di Hindia Belanda melalui penerbitan surat kabar mingguan *Bataviaasche Koloniale Courant*.²³ Namun,

²¹ Trimansyah, *Sejarah Perbukuan.....*, hlm. 26-29

²² Trimansyah, *Sejarah Perbukuan*, hlm. 30

²³ Ahmat B. Adam, "The Vernacular Press and The Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)", London: *Tesis University of London*, 1984, hlm. 20

pendaratan Inggris di Jawa pada 1811 kemudian menghentikan pencetakan dan penerbitan *Bataviaasche Koloniale Courant* yang kemudian digantikan oleh mingguan berbahasa Inggris *Java Government Gazette*. Terbitan ini hanya bertahan selama lima tahun, hingga wilayah Hindia Belanda dikembalikan kepada Belanda. Setelah itu, pemerintah kolonial kembali menerbitkan mingguan berbahasa Belanda dengan nama *Bataviaasche Courant* pada 1816.

Kondisi industri percetakan di Hindia Belanda hingga awal abad ke-19 masih didominasi oleh percetakan pemerintahan dan Zending.²⁴ Namun perkembangan dalam industri percetakan di Eropa pada seperempat pertama abad ke-19 serta pertumbuhan ekonomi yang pesat di Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19 memunculkan banyak rumah cetak yang bergelut dalam percetakan dan penerbitan, utamanya surat kabar, di berbagai kota Hindia Belanda. Mesin cetak silinder yang dikembangkan oleh Friedrich König pada 1812 memberikan cara bagi rumah cetak untuk mencetak ribuan lembar kertas dalam waktu yang singkat tanpa membutuhkan tenaga yang banyak.²⁵ Media pers seperti surat kabar bisa diproduksi dalam jumlah ribuan dengan menggunakan satu mesin cetak saja.

²⁴ Adam, "The Vernacular Press.....", hlm. 21. Adam menjelaskan bahwa dominasi dari percetakan pemerintah dan misionaris pada awal abad ke-19 ini disebabkan oleh sedikitnya minat dari para penduduk untuk mendirikan percetakan pribadi dan kurangnya tenaga kerja handal dalam menyusun huruf-huruf. Selain itu, rendahnya jumlah orang yang bisa membaca di Hindia Belanda pada saat itu menyebabkan pasar yang bisa dijangkau oleh percetakan pribadi ini sangatlah terbatas.

²⁵ Colin Clair, 1976, *A History of European Printing*, (New York: Academic Press, 1976) hlm. 360-361. Perkembangan mesin cetak ini tidak terlepas dari lonjakan populasi masyarakat di negara-negara Eropa pada masa revolusi Industri yang mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap surat kabar. Produksi surat kabar meningkat drastis dari 200 eksemplar perjam pada 1800 menjadi 1.100

Sementara industri percetakan dan media di Eropa dan Amerika tumbuh seiring dengan inovasi dan perkembangan mesin cetak, di Hindia Belanda industri perkebunan tumbuh seiring dengan penetapan sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*) sejak 1830.²⁶ Peningkatan volume perdagangan produk-produk perkebunan seperti gula, teh, kopi, dan tembakau menyebabkan kota-kota pelabuhan seperti Batavia dan Surabaya menjadi tempat bagi para pedagang dan pemilik modal untuk berkumpul dan memasarkan produknya. Hal ini menjadi kondisi yang cocok bagi berkembangnya bisnis percetakan dan penerbitan surat kabar.

Percetakan milik swasta mulai didirikan guna memproduksi dan menerbitkan surat kabar di berbagai kota pelabuhan di Hindia Belanda. Pada 1829 di Batavia telah terbit *Nederlandsch Indisch Handelsblad*, di Surabaya percetakan milik F. C. Smith menerbitkan *Soerabaijasch Courant* pada 1837, dan di Semarang percetakan *Oliphant & Co. Printing Press* menerbitkan *Semarangsche Advertentieblad* pada 1845.²⁷ Informasi yang dimuat di dalam surat kabar-surat kabar ini kebanyakan masih berfokus pada perdagangan seperti harga-harga barang,

eksemplar perjam pada 1814 dan 10.000 eksemplar perjam pada 1848 (lihat Clair 1976:355-367)

²⁶ Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019) hlm. 356-359. Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) diprakarsai oleh Van den Bosch untuk memperbaiki kondisi ekonomi pemerintahan Belanda yang habis terkuras akibat Perang Diponegoro (1825-1830) dan pemisahan Belgia (1830). Sistem Tanam Paksa mewajibkan penyisihan seperlima tanah garapan untuk penanaman tanaman ekspor yang kemudian akan diserahkan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam praktiknya kemudian terjadi penyelewengan yang menyebabkan wabah kelaparan di beberapa daerah (lihat Kartodirjo 2019:356-389)

²⁷ Adam, "The Vernacular Press.....", Hal. 24-25

kedatangan dan keberangkatan kapal-kapal dagang, serta iklan-iklan dari produk-produk milik pengusaha lokal.

Meski perdagangan dan ekonomi Hindia Belanda tumbuh dengan pesat setelah pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, namun pertumbuhan tersebut tidak dinikmati oleh masyarakat-masyarakat pribumi lokal yang menjadi subjek dari tanam paksa. Pada pertengahan dekade 1840-an terjadi krisis kelaparan di Cirebon akibat pengalihan tanah dan tenaga kerja untuk memenuhi kuota tanam paksa yang menyebabkan produksi tanaman pangan menurun.²⁸ Krisis ini membawa perhatian terhadap penyelewangan pelaksanaan Sistem Tanam Paksa dan menumbuhkan dukungan dari kalangan liberal untuk pengakhiran sistem tersebut serta perbaikan manajemen koloni di parlemen Belanda. Kritik dan dorongan terhadap pemerintahan koloni untuk mengakomodasi asas-asas liberal muncul dari kalangan politisi serta pers baik di negeri induk maupun di Hindia Belanda. Hal ini kemudian melahirkan konstitusi baru bagi Hindia Belanda yang dikenal sebagai *Regeerings Reglement* (Peraturan Pemerintah) pada 1854.²⁹

Regeerings Reglement menjadi langkah awal dalam penghapusan sistem tanam paksa serta memberikan harapan bagi pergerakan politik Hindia Belanda ke arah yang lebih liberal, termasuk di dalamnya liberalisasi dalam industri percetakan dan penerbitan. Artikel 110 dalam *Regeerings Reglement* menjadi wujud upaya politisi Belanda untuk mengatur peran pemerintah Hindia Belanda dalam

²⁸ Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia.....*, hlm. 365.

²⁹ Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2020) hlm. 20-21

pengawasan terhadap industri percetakan dan penerbitan yang berkembang di Hindia Belanda. Paragraf pertama dari artikel 110 menyatakan bahwa:

“Pengawasan Pemerintah terhadap mesin cetak diatur dengan peraturan umum, berdasarkan asas bahwa penerbitan pikiran atau perasaan melalui mesin cetak dan penerimaan dokumen yang dicetak di luar wilayah Hindia Belanda tidak boleh menemui halangan apa pun, kecuali yang diperlukan demi kepentingan Negara.”³⁰

Dua tahun setelah dikeluarkannya *Regeerings Reglement*, pemerintah Hindia Belanda kemudian mengeluarkan *Staatsblad* No. 74 Tahun 1856 (*Drukpersreglement*) yang mengatur mengenai kegiatan percetakan, penerbitan, serta penjualan buku-buku, majalah, surat kabar, dan media-media cetak lainnya di Hindia Belanda.³¹ Peraturan ini menekankan upaya preventif untuk menyensor dan menghukum pencetak, penerbit, penulis, dan penjual dari materi-materi cetak yang dianggap melanggar ketentuan di dalamnya maupun yang membahayakan posisi pemerintahan di Hindia Belanda sebelum disebarluaskan ke masyarakat. Tak lama setelah diterbitkan, *Drukpersreglement* menjadi objek perdebatan kalangan pers koloni maupun politisi Belanda. Banyak kritik dilayangkan pada peraturan tersebut yang dianggap dapat menjadi satu peraturan fleksibel yang dapat menyensor segala hasil cetak yang tidak disukai pemerintah. Namun disisi lain ada pula yang

³⁰ Ph. Kelintjes, *Staatsintellingen van Nederlandsch-Indie*, (Amsterdam: Drukkerij en Uitgeverij J.H. de Bussy, 1932) hlm. 162

³¹ S. Helene Reboul, “Het Reglement Op De Drukwerken In Nederlandsch Indie” *De Gids*, Vol. 21, 1857, hlm. 381. Disebutkan bahwa dalam *Drukpesreglement* setiap orang dapat mendirikan sebuah percetakan jika telah menyediakan jaminan sebesar f 200 hingga f 5.000, memperoleh izin dari Gubernur Jenderal dan pemerintah daerahnya. Namun peraturan ini juga memberi kewenangan pada Gubernur Jenderal untuk menutup dan menyita percetakan yang dianggap menerbitkan materi berbahaya sehingga dianggap masih memiliki celah yang besar bagi pemerintah koloni untuk membungkan pers yang kritis kepadanya.

melihat peraturan ini sebagai satu kemajuan, yang meskipun masih terbatas, dapat menjadi satu petunjuk bagi regulasi pers kedepannya.

Kemunculan *Drukpersreglement* ini sendiri tidak serta merta menghentikan perkembangan pers dan percetakan di Hindia Belanda. Namun begitu, keberadaannya memberikan suatu batasan bagi pencetak dan penerbit untuk tidak memuat kabar buruk maupun kritik terhadap pemerintah. Oleh karenanya, kebanyakan surat kabar yang muncul di paruh kedua abad ke-19 masih berkuat pada permasalahan perdagangan, pelayaran, pengumuman pemerintah, peristiwa luar negeri, serta peristiwa lokal.

Penggunaan mesin telegraf pada 1856, diikuti oleh pengenalan sistem pos modern pada 1862, serta pembukaan jalur kereta api pertama pada 1867 memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk lebih leluasa bertukar informasi.³² Para pencetak dan penerbit dapat mengirimkan surat kabar, surat, buku dan berbagai macam hal lain dengan cepat melalui kantor pos dan kereta api kepada pelanggan mereka. Sedangkan para penulis dan editor dapat dengan segera mendapatkan kabar dari pemerintah maupun kabar dari wilayah lain dengan mudah melalui telegraf. Pemerintah juga mulai mengambil langkah untuk menerapkan edukasi bergaya Barat ke masyarakat meski masih dalam jumlah yang terbatas.

³² Adam, "The Vernacular Press.....", Hal. 53-54. Hilmar Farid dalam bukunya "Perang Suara: Bahasa dan Politik Pergerakan", menjelaskan bahwa pembangunan berbagai moda transportasi dan alat komunikasi ini tidak terlepas dari upaya pengefisiensian sistem perkebunan yang dimiliki oleh para kapitalis. Namun dalam perkembangannya fasilitas-fasilitas tersebut juga digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dan bertukar informasi satu sama lainnya (Hilmar Farid, *Perang Suara: Bahasa dan Politik Pergerakan*, (Depok: Komunitas Bambu, 2024) hlm. 11).

Pada 1848 pemerintah Hindia Belanda memberikan uang berjumlah f 25.000 untuk biaya pembangunan dan operasional beberapa sekolah Bumiputra.³³ Hingga 1860, jumlah sekolah yang telah didirikan oleh pemerintah di Jawa berjumlah 41 sekolah, sementara di pulau-pulau luar Jawa berjumlah 17 sekolah. Oleh karenanya, sejak pertengahan dekade 1850-an beberapa surat kabar berbahasa Jawa dan Melayu telah muncul untuk mengambil pasar pembaca baru yang muncul pasca penerapan pendidikan bergaya Barat di Hindia Belanda.

Pada 1860, di Semarang terbit mingguan *Selompret Melajoe* yang dicetak dan diterbitkan oleh *C.G.T. van Dorp & Co.* yang juga mencetak surat kabar berbahasa Belanda *Semarangsche Courant*. Berbeda dengan surat kabar berbahasa Melayu maupun Jawa yang sebelumnya telah terbit, *Selompret Meajoe* tidak hanya berfokus pada satu kalangan pasar saja.³⁴ Ia berusaha menarik perhatian dari berbagai macam kalangan mulai dari para pedagang, priyayi, pegawai sipil, militer, baik itu melalui kolom berbahasa Melayu maupun kolom berbahasa Jawa. Setahun setelah *Selompret Melajoe* terbit, muncul surat kabar Melayu lainnya di Surabaya yang dicetak dan diterbitkan oleh *Gebroeders Gimber & Co.* dengan nama *Bintang*

³³ Adam, "The Vernacular Press.....", hlm. 27-28

³⁴ Pada 1855 di Surakarta telah terbit surat kabar pertama yang berbahasa Jawa bernama *Bromartani*. Surat kabar ini dicetak oleh Hartevelt Brothers menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil dan hanya beredar dilingkungan keraton Surakarta serta sekolah-sekolah. Oleh karenanya surat kabar tersebut kekurangan pelanggan dan kemudian ditutup pada tahun 1856. Di tahun yang sama dengan berakhirnya *Bromartani*, di Surabaya muncul surat kabar pertama yang menggunakan bahasa melayu. Surat kabar ini bernama *Soerat Kabar Bahasa Melajoe* dan diterbitkan oleh *E. Fuhri & Co.* Surat kabar ini berfokus pada kalangan pedagang dan pemilik toko di Jawa Timur dan hanya bertahan selama tiga bulan sebelum kemudian tutup karena kekurangan pelanggan (lihat Adam, 1984:40-48).

Timoer. Surat kabar ini menggunakan bahasa Melayu Rendah dan juga menargetkan berbagai kalangan di kota, sama seperti dengan *Selompret Melajoe*. Sementara itu, di Batavia muncul surat kabar mingguan milik missionaris yang diproduksi oleh *Ogilvie & Co.* pada 1967 dengan nama *Biang-Lala*.

Selain perluasan cakupan pasar dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama cetakan surat kabar yang terbit, paruh kedua abad ke-19 juga menjadi awal penyebaran percetakan di kawasan luar pulau Jawa yang didukung oleh pembangunan infrastruktur transportasi. Pada 1859 di Padang muncul surat kabar berbahasa Belanda *Padangsche Nieuwsen Advertentieblad* yang kemudian disusul oleh penerbitan surat kabar berbahasa Melayu *Bintang Timor* pada 1864. Di Makassar telah muncul *Macassarsch Weekblad* yang dicetak dan diterbitkan oleh *W. Eekhout & Co.* pada 1861. Di Minahasa, terinspirasi dari penerbitan surat kabar di Jawa, Nicholaas Graafland menulis kepada pimpinan *Missionary Society* mengenai kebutuhan pers di Minahasa guna menyebarkan ajaran Kristen. Tak lama berselang mesin cetak serta seorang missionaris yang ahli dalam mengoperasikannya dikirim, dan pada 1868 surat kabar *Tjahaja Siang* diterbitkan.³⁵

Dua dekade terakhir dari abad ke-19 menyaksikan lahirnya percetakan dan pers milik orang-orang Tionghoa. Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh turunnya harga kopi dan gula telah memberikan kesempatan pada pengusaha Tionghoa untuk membeli dan memiliki percetakan dan persnya sendiri.³⁶ Pada 1884 orang-orang

³⁵ Adam, "The Vernacular Press.....", hlm. 63-64

³⁶ Iyus Jayusman & Miftahul Habib Fachrurozi, "Eksistensi Kaum Tionghoa dalam Dunia Pers di Hindia Belanda Tahun 1869-1942" *BIHARI*, Vol. 4 (1), 2021, hlm. 54

Tionghoa seperti Oeij Tjai Hin, *Goang Hong & Co.*, dan Yap Goan Ho, telah memiliki percetakan dalam skala kecil untuk mencetak dan menerbitkan kisah-kisah dari Cina ke dalam bahasa Melayu Rendah di Batavia.³⁷ Kemudian pada akhir tahun 1885 di Buitenzorg, seorang Tionghoa bernama Lie Kim Hok membeli percetakan milik D. J. van der Linden dengan harga f 1.000.³⁸ Percetakan milik Lie Kim Hok ini hanya bertahan selama 2 tahun sebelum kemudian dijual kepada percetakan milik Eropa *Albrecht & Co.* di Batavia. Memasuki akhir 1886, *Gebroeders Gimber & Co.* yang mencetak surat kabar *Bintang Timor* di Surabaya telah menyatakan kebangkrutan dan berencana untuk melelang percetakan beserta dengan semua produk-produknya. Seorang Tionghoa peranakan bernama Baba Tjoa Tjoan Lok kemudian berhasil memenangkan lelang dan membeli percetakan *Gebroeders Gimber & Co.* dan produk-produknya dengan harga f 24.600. Melalui percetakan yang baru tersebut Baba Tjoa Tjoan Lok kemudian melanjutkan penerbitan *Bintang Timor*, namun kontennya berubah dan banyak diisi oleh kabar-kabar yang berhubungan dengan orang Tionghoa.³⁹

³⁷ Adam, "The Vernacular Press.....", hlm. 133

³⁸ van der Linden merupakan seorang misionaris Calvinis yang menjadi editor dari *Bintang Djohar*. Pada Agustus 1885, van der Linden meninggal dunia dan istrinya kemudian menjual percetakan miliknya kepada Lie Kim Hok yang telah menjadi murid serta teman dari van der Linden. Setelah dibeli oleh Lie Kim Hok, percetakan ini mulai memproduksi buku bacaan bagi sekolah serta kebutuhan cetak perusahaan. Namun pada 1886 W. Meulenhoff, editor dari *Pemberita Betawi* membeli sebagian saham perusahaan dan mendirikan *Lie Kim Hok & Co.* yang kemudian pindah ke Batavia untuk mencetak *Pemberita Betawi* (lihat Adam, 1984:129-132) .

³⁹ Sebuah perkumpulan peranakan Hokkian bernama *Hok Kian Kong Tik Soe* yang sebelumnya mempromosikan kegiatannya di berbagai surat kabar milik orang Belanda mulai memindahkan iklan-iklannya ke *Bintang Timor* sejak

Pembelian Tjoa Tjoan Lok menandai hal baru dalam perkembangan pers di Hindia Belanda. Bintang Timor yang berfokus pada kabar-kabar Tionghoa banyak diminati di kalangan orang-orang Tionghoa dan kemudian dijadikan sebagai surat kabar harian dengan nama *Bintang Soerabaia*. Terinspirasi dari kesuksesan tersebut, orang-orang Tionghoa lain mulai mencoba untuk mencetak dan menerbitkan surat kabar di masing-masing daerah. Pada 1887 di Semarang muncul *Tamboor Melayoe* yang keluar tiga kali seminggu dan diterbitkan oleh Sie Hian Ling dengan bantuan Gebroeders Jansz. Di Batavia, Yap Goan Ho yang sebelumnya menerjemahkan dan mencetak buku-buku serta cerita dari Cina beralih untuk mencetak dan menerbitkan surat kabarnya sendiri dengan nama *Sinar Terang* pada 1888. *Bintang Barat* yang juga terbit di Batavia mengangkat Oeij Tjai Hin sebagai editor surat kabar dan mengganti fokus pemberitaannya untuk menyoal kalangan Tionghoa pada 1893. Setahun kemudian di Padang terbit dua kali seminggu sebuah surat kabar dengan nama *Pertja Barat* dibawah pengelolaan Lie Bian Goan dan diedit bersama dengan Dja Endar Moeda. Di Ambon muncul Baba Ong Kie Hong yang menjadi editor serta manager dari *Penghentar* cetakan *Ambonsche Drukkerij* pada 1897. Sementara itu seorang Tionghoa yang telah memperoleh status sebagai orang Eropa di Manado dengan nama K. D. Que mendirikan *Manadosche Drukkerij* pada 1899.⁴⁰

pengambilalihan percetakan dan surat kabar tersebut (Jayusman & Fachrurozi, 2021:54).

⁴⁰ Adam, "The Vernacular Press.....", hlm. 138-141

Hingga awal abad ke-20 antusiasme orang Tiongha untuk terlibat ke dalam dunia pers dan percetakan terus bertahan. Hal tersebut, ditambah dengan peningkatan orang-orang terdidik di kalangan Bumiputra, telah menggeser dominasi orang-orang Eropa dalam kepemilikan pasar percetakan dan surat kabar secara perlahan. Seiring dengan itu peran pers dan percetakan pun berubah dari tempat untuk menyiarkan kabar dan mempromosikan barang menjadi sebuah “organ” bagi organisasi dan kelompok untuk mendukung dan menyebarkan ide serta kepentingan mereka. Hal ini dapat dilihat pada Kota Makassar di awal abad ke-20, yang berkembang menjadi salah satu pusat penting pertumbuhan pers dan percetakan di kawasan Timur Hindia Belanda. Kemajuan infrastruktur kota, perluasan ruang publik, serta meningkatnya jumlah kaum terdidik yang kemudian membentuk berbagai organisasi memberikan landasan kuat bagi dinamika tersebut, yang akan dibahas secara lebih rinci pada bagian selanjutnya.

2.2. Modernitas Kota Makassar di Awal Abad Ke-20

Perkembangan Makassar sebagai kota modern pada awal abad ke-20 tidak bisa dilepaskan dari letak geografisnya yang strategis serta peran historisnya sebagai pelabuhan penting di wilayah Timur Nusantara. Secara lokasi, Makassar memiliki karakteristik geografis yang mendukung pertumbuhan kota pelabuhan. Garis pantainya terbuka tanpa hambatan hutan bakau, memungkinkan kapal mudah merapat, sementara wilayah daratannya berupa dataran luas yang cocok untuk pemukiman dan kegiatan pertanian. Dua sungai besar, yakni Sungai Tallo di utara dan Sungai Jeneberang di selatan, menyediakan sumber air bagi kebutuhan

domestik dan irigasi. Selain itu, di sebelah barat kota, gugusan Pulau Spermonde berperan sebagai pelindung alami terhadap gelombang laut dan badai musiman.⁴¹

Sejak awal abad ke-16, Makassar telah menjadi salah satu pelabuhan penting di kawasan Timur Nusantara. Kapal-kapal dari berbagai wilayah, terutama dari kalangan pedagang Melayu dan Portugis, rutin singgah di pelabuhan ini untuk berdagang. Hal ini dimungkinkan berkat kebijakan laut terbuka yang diterapkan oleh Kerajaan Gowa-Tallo. Namun, VOC yang menginginkan monopoli terhadap rempah memandang hal tersebut sebagai sebuah halangan dan memutuskan untuk menyerang Kerajaan Gowa-Tallo. Pada 1669, Makassar berhasil ditaklukkan pada dan VOC memaksakan Perjanjian Bongaya⁴². Melalui perjanjian ini, VOC mulai memberlakukan sistem monopoli atas perdagangan rempah-rempah dari Maluku dan menetapkan aturan bahwa semua pedagang yang ingin berdagang di kawasan tersebut harus mendapatkan izin dari mereka. Makassar pun diubah menjadi pos penting VOC untuk mengawasi lalu lintas pelayaran dan perdagangan di kawasan Timur.

Pada Desember 1799, VOC dibubarkan setelah perusahaan tersebut mengumpulkan hutang yang besar, dan perannya digantikan oleh pemerintahan

⁴¹Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, (Jakarta: KPG, 2016) hlm. 13-14.

⁴² Isi Perjanjian Bongaya memberikan banyak kuasa terhadap VOC atas perdagangan dan pelayaran di Makassar. Beberapa diantaranya adalah mengusir pedagang-pedagang Eropa dari Makassar (Pasal 6), memberikan VOC hak-hak untuk berdagang tanpa berbagai macam syarat maupun kewajiban (Pasal 8), dan melarang orang-orang Makassar untuk melakukan pelayaran ke Maluku (Pasal 9). Selain itu benteng-benteng pertahanan yang sebelumnya didirikan harus dihancurkan (Pasal 10) kecuali Benteng Jumpandang yang akan dikuasai oleh VOC (Pasal 11) (lihat Poelinggomang, 2016:29-30).

Hindia Belanda. Namun, pergantian kekuasaan ini tidak secara langsung mengubah situasi Belanda di Nusantara. Inggris, yang menjadi saingan utama Belanda di Asia, memperkuat posisinya dengan membuka pelabuhan bebas di Singapura pada 1819, yang segera menjadi pusat perdagangan baru. Untuk menyeimbangkan kekuatan dan meredakan persaingan, Inggris dan Belanda menandatangani Traktat London pada Maret 1824. Salah satu poin penting dalam traktat tersebut adalah kewajiban kedua pihak untuk membuka pelabuhan mereka bagi kapal dagang dari masing-masing negara.

Sebagai respons, Belanda mulai menata ulang pelabuhan Makassar. Setelah kunjungan Gubernur Jenderal van der Capellen, diterbitkan peraturan *Nieuwe Organisatie* 1824 melalui *Staatblad* Nomor 31a, yang menjadikan Makassar sebagai distrik sekaligus pusat administrasi baru di Sulawesi.⁴³ Pada Juli 1824, pelabuhan ini dibuka untuk pedagang asing melalui Surat Keputusan No. 10. Namun, karena masih diterapkannya sistem monopoli dan pajak tinggi, pelabuhan Makassar tetap kurang diminati, dan banyak pedagang asing lebih memilih Singapura. Upaya memperbaiki situasi dilakukan kembali pada 1832, namun hasilnya masih belum memuaskan.

Baru pada 1 Januari 1847, setelah berbagai pertimbangan dan usulan, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Makassar sebagai “Pelabuhan Bebas”.

⁴³ Dias Pradadimara, “Dibentuknya Negara Kolonial Di Sulawesi Bagian Selatan Di Abad Ke19” *Lensa Budaya*, Vol. 12 (2), 2017, hlm. 61. Selain pembentukan administrasi baru untuk mengatur wilayahnya di Sulawesi, pemerintah Hindia Belanda juga melakukan perundingan ulang dengan kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan mengenai pasal-pasal Perjanjian Bongaya guna mempertegas kedudukan, hak dan kewajiban antara Belanda dan kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan (lihat Pradadimara, 2017:60-63).

Keputusan ini membawa perubahan besar bagi kota tersebut. Arus perdagangan dan pelayaran meningkat pesat, disertai pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur kota.⁴⁴ Banyak perusahaan asing, toko, dan kantor perdagangan mulai bermunculan untuk melayani aktivitas niaga. Meskipun status pelabuhan bebas ini hanya bertahan hingga tahun 1880 dan mengalami penurunan setelahnya, pengaruh kebijakan tersebut sangat signifikan.⁴⁵ Makassar tumbuh menjadi pusat pemerintahan dan administrasi Hindia Belanda di Sulawesi dan dikenal sebagai salah satu kota dengan perkembangan paling pesat di luar Pulau Jawa.

Pertumbuhan penduduk dan peningkatan arus perdagangan serta pelayaran yang terjadi di Makassar pada paruh kedua abad ke-19 juga dialami oleh berbagai daerah di Hindia Belanda. Hal ini meningkatkan kebutuhan pengelolaan administrasi di tingkat lokal yang terus meningkat dan membebaskan pemerintahan pusat di Batavia. Ditambah lagi dengan pelaksanaan Politik Etis yang menuntut pembangunan berbagai fasilitas pada tingkat daerah yang menambah kebutuhan administrasi lokal untuk mengelola hal-hal tersebut. Oleh karenanya perubahan struktur pemerintahan dirasa perlu untuk mengakomodasi urusan-urusan daerah yang semakin meningkat.⁴⁶

⁴⁴ Wirawan, *Sejarah Masyarakat Tionghoa*, hlm. 61

⁴⁵ Poelinggomang, *Makassar Abad XIX*, hlm. 143-144. Pradadimara menyatakan bahwa penurunan ini sendiri tidak terlepas dari pemindahan perhatian pemerintah Hindia Belanda ke Surabaya yang menjadi pesaing baru dari Singapura serta pendirian KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*) yang merubah pola pelayaran dan perdagangan (lihat Pradadimara, 2017:64-65).

⁴⁶ Teti Hestilani, "Desentralisatie Wet Van Nederland Indies 1903" *ISTORIA*, Vol. 15 (2), 2019, hlm. 210-211

Pada 1903, atas usulan dari Mentri Koloni, A.W.F. Idenburg, maka undang-undang desentralisasi yang dikenal sebagai *Decentralisatie Wet* diterima oleh Parlemen Belanda. Undang-undang ini mengubah ketentuan dalam pasal 68 *Regeringsreglement* dengan penambahan pasal 68a, 68b, dan 68c yang isinya memberikan kekuasaan bagi daerah-daerah yang dipandang mungkin untuk membentuk dewan lokal guna mengelola urusan keuangan daerah.⁴⁷ Pada 1906, pemerintah Hindia Belanda melalui *Staatsblad* No. 171 Tahun 1906 memberikan Makassar bersama dengan beberapa kota lain di Hindia Belanda status sebagai *Gementee* (Pemerintahan Kota) yang bisa mengambil keputusan mengenai masalah pengelolaan kebijakan dan keuangannya secara mandiri. Modernitas kota mulai terbentuk dan dapat dilihat dari beberapa aspek, mulai dari ruang kota modern, respon dan ekspresi yang ditimbulkan dari keberadaan ruang modern kota, serta kontradiksi yang ditimbulkan dari proses modernisasi yang terjadi.⁴⁸

2.2.1. Infrastruktur Modern Kota

Setelah kekalahan Gowa dalam Perang Makassar (1666–1669), VOC membagi wilayah Makassar ke dalam beberapa zona pemukiman, mengikuti pola pengelompokan yang umum diterapkan di kota-kota lain di bawah kekuasaan

⁴⁷ Hestilani, “Desentralisatie Wet Van...”, hlm. 212. Selain *Desentralisatie Wet* pemerintah juga mengeluarkan *Decentralisatie Besluit* dan *Local Raden Ordonnantie* pada 1905. *Decentralisatie Besluit* mengatur pokok-pokok pembentukan, susunan, kedudukan, dan wewenang dewan (*Raad*) dalam pengelolaan keuangan yang terpisah dari pemerintah pusat. Sedangkan *Local Raden Ordonnantie* mengatur struktur, status, kewenangan dewan (*Raad*), mulai dari *Gewestelijke Raad* (Dewan Daerah), *Plaatselijk Raad* (Dewan Lokal), dan *Gemeenteraad* (Dewan Kota) (lihat Hestilani, 2019:213).

⁴⁸ Ilham Daeng Makkelo, “Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar Pada Abad Ke-20” *Jurnal Sejarah*, Vol. 1 (2), 2018, hlm. 48-49

Belanda. Pembagian ini didasarkan pada perbedaan status sosial dan ekonomi penduduk. Kawasan hunian untuk orang Eropa dan kelompok Asia kaya umumnya berpenduduk jarang, memiliki rumah besar yang terpisah jarak, serta dilengkapi jalan lebar. Area tersebut sekaligus berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan administrasi kota, menampung kantor-kantor pemerintah serta gedung-gedung perusahaan besar. Sementara itu, orang Eropa, Asia, dan Bumiputra berpenghasilan menengah cenderung tinggal di wilayah yang lebih padat, dengan jalan sempit serta rumah-rumah kecil yang rapat dan sering merangkap sebagai tempat usaha. Adapun masyarakat Bumiputra dan kelompok Asia Asing berpenghasilan rendah menempati kawasan kampung di pinggiran kota, yang umumnya padat, memiliki sanitasi buruk, dan minim fasilitas umum.⁴⁹

Benteng Rotterdam menjadi pusat pemerintahan VOC sekaligus kawasan tempat tinggal bagi orang-orang Eropa, termasuk pegawai, pejabat perusahaan, dan serdadu, yang menetap di balik dinding benteng. Di sebelah Utara benteng berkembang permukiman yang dikenal sebagai *Vlaardingen*, dihuni oleh sejumlah orang Eropa, Tionghoa dan Asia Asing lainnya, serta sebagian Bumiputra, yang berfungsi sebagai pusat perekonomian dan arus perdagangan kota. Lebih ke utara lagi terdapat *Kampung Melayu*, tempat tinggal komunitas Melayu, Bugis, dan Makassar yang banyak bekerja sebagai nelayan, petani, pelaut, dan pedagang. Di sisi selatan benteng muncul *Kampung Baru*, yang dihuni oleh masyarakat

⁴⁹ Pauline K. M. van Roosmalen, "Designing Colonial Cities: The Making of Modern Town Planning in The Dutch East Indies and Indonesia 1905-1950" *The Newsletter*, No. 57, 2011, hlm. 7

peranakan, Bumiputra beragama Kristen, serta mantan budak yang telah dimerdekakan.⁵⁰

Pola pembagian permukiman tersebut bertahan hingga awal abad ke-20, meskipun sejumlah wilayah baru ditambahkan di beberapa bagian kota. Pusat pemerintahan dan aktivitas warga Eropa bergeser ke arah Timur dan tenggara dari Benteng Rotterdam, berpusat di *Koeningsplein* (Lapangan Raja). Di sekeliling *Koeningsplein* berdiri bangunan-bangunan bergaya Eropa dengan berbagai fungsi. Bagian utara dan barat menjadi lokasi gedung-gedung pemerintahan seperti Balai Kota, Dewan Peradilan, Rumah Gubernur, Kantor Pos, Kantor Polisi, dan Penjara Kota. Sementara di sisi selatan berdiri Gereja Protestan Immanuel, Rumah Sakit Palemonia, dan Tangsi Militer.⁵¹ Kawasan ini juga dilengkapi dengan fasilitas hiburan dan pertemuan seperti Gedung *Societet de Harmonie*, Bioscop Borneo, Grand Hotel, Empress Hotel, Bioscop Luxtor, dan Kolam Renang Harmonie.

Kawasan perdagangan yang berpusat di *Vlaardingen* mulai merambah ke bagian Utara dan Timur pemukiman seiring dengan pembangunan pelabuhan dan pemukiman baru. kawasan ini tetap menjadi pusat perekonomian yang ramai dan dikunjungi oleh berbagai kalangan, mulai dari orang-orang Eropa, Asia, maupun Bumiputra. Dermaga pelabuhan ramai dipenuhi oleh kapal-kapal nelayan, pedagang serta penumpang yang bersandar untuk menurunkan dan menaikkan barang dagangan, penumpang, serta suplai kapal. Gerobak-gerobak dan kuli angkut

⁵⁰ Asmunandar & Bahri, "The History of Makassar City: Physical and Administrative Development" *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 473, 2020, hlm. 599

⁵¹ Asmunandar & Bahri, "The History of Makassar....", hlm. 600

mondar-mandir dari gudang-gudang milik berbagai perusahaan yang berjejer disepanjang pesisir dermaga membawa berbagai macam barang. Dalam catatan pada tahun 1902, pelabuhan Makassar telah dideskripsikan sebagai berikut:

“... di depan gedung-gedung putih di sepanjang dermaga dan kapal-kapal di pelabuhan. Pemandangannya ceria, hidup dan indah; ini lebih mengingatkan pada pelabuhan Eropa daripada pelabuhan India. Kapal-kapal tersebut sebagian ditambatkan di dermaga di depan dermaga, dan di sepanjang dermaga itu menjulang deretan gudang dan kantor berwarna putih tinggi, di depannya terdapat tumpukan segala jenis barang dagangan. Tembakan meriam dan peluit uap membangunkan para kuli dari tidur pagi mereka; kita melihat mereka berjalan dalam pasukan ...”⁵²

Tidak jauh dari dermaga pelabuhan terdapat *Passerstraat*, kawasan yang menjadi pusat hunian sekaligus aktivitas masyarakat Tionghoa di Makassar. Wilayah ini dipenuhi bangunan yang berdiri rapat satu sama lain. Berbagai toko berjejer di sepanjang jalan menawarkan berbagai macam produk impor. Di kawasan *Vlaardingen* ini juga berdiri kantor-kantor perusahaan dari beragam sektor, seperti perusahaan pelayaran *Koninklijke Paketvaart-Maatschappij* (KPM), institusi perbankan *Nederlandsch-Indische Handelsbank* (NIH), *Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij* (NIEM), maupun perusahaan asuransi *Blom & van der Aa* dan *Olveh van 1879*.⁵³

Kepadatan aktivitas masyarakat, ditambah dengan posisi *Vlaardingen* yang menjadi penghubungan antara kawasan pemerintahan dan pemukiman-pemukiman lain, menjadikan wilayah tersebut sebagai lokasi strategis bagi industri pers dan

⁵² Johan F. van Bemmelen & Gijsbert B. Hooyer, *Reisgids voor Nederlandsch-Indie*, (Amsterdam: J.H. De Bussy, 1902) hlm. 131.

⁵³ A. Vunderik, *Gids van Makassar en Zuid-Celebes*, (Makassar: N.V. Handelsdrukkerij en Kantorhandel Celebes, 1938) hlm. IX-XV.

percetakan. Lokasinya yang dekat dengan berbagai gedung usaha dan gedung pemerintah memudahkan percetakan untuk mencari konsumen dalam jumlah yang besar. Sementara itu, para jurnalis dapat dengan mudah mencari berita maupun peristiwa luar kota dari berbagai masyarakat yang berlalu-lalang serta surat dari koresponden pada kantor pos di pusat kota. Tidak mengherankan apabila sebagian besar kantor redaksi surat kabar, seperti *Pemberita Makassar*, *Sinar Matahari*, *Barisan Kita*, dan *Makassarsche Courant*, serta berbagai percetakan, termasuk *Celebes Drukkerij*, *Mercurius Drukkerij*, dan *Volksdrukkerij* muncul dan berkembang di kawasan ini.

Dalam hal transportasi, Kota Makassar juga semakin banyak dilalui oleh berbagai jenis moda kendaraan. Seiring dengan meluasnya jaringan jalanan yang dibangun oleh pemerintah kota serta perkembangan pesat industri kendaraan bermotor pada awal abad ke-20, maka jalan-jalan kota seperti *Hoogepad*, *Prinshendriklaan*, *Gouverneurslaan* dan *Hospitaalweg* semakin ramai dihiasi oleh lalu-lintas dari mobil dan motor bermerek. Kendaraan-kendaraan tersebut terdiri dari mobil dan motor milik para saudagar dan pejabat kota serta mobil-mobil sewaan dari para turis dan penjelajah yang berkunjung. Sementara itu bagi para penduduk dengan penghasilan menengah dan bawah, sepeda, andong, becak, serta bus menjadi pilihan dalam beraktivitas sehari-harinya. Hal ini dimanfaatkan oleh jurnalis untuk menghantarkan mereka ke berbagai wilayah dengan cepat dan dapat memenuhi kebutuhan kabar dari surat kabar harian di kota. Theodora Benson, seorang bangsawan Inggris yang mengunjungi Makassar pada pertengahan tahun 1930-an mendeskripsikan pengalamannya:

“Tentunya ada bus di daerah dimana terdapat jalan. Penumpang pun merasa cukup nyaman jika bisa duduk di sebelah sang sopir. Seorang kawan yang berprofesi sebagai jurnalis menggunakan jasa bus kemana saja ia pergi.”⁵⁴

Kemajuan dan kemodernan kota ini sendiri tidak serta merta dirasakan oleh segala kalangan. Berbanding terbalik dengan kawasan pemukiman milik orang-orang Eropa dan Timur Asing di pusat kota yang memiliki berbagai macam fasilitas seperti penerangan dan pengairan yang tertata rapi, kawasan pemukiman Bumiputra yang berada di sekeliling kota hanya memiliki fasilitas yang terbatas dan tidak tertata rapi. Rumah-rumah permanen yang terdiri dari batu masih jarang ditemui, jalan-jalan tertutupi oleh lumpur, sementara irigasi dan sanitasi masih belum memadai. Seorang Ambon yang datang ke Makassar untuk menempuh pendidikan pada 1914 menuliskan impresinya:

“Roemah2 batoe masih djarang letaknja sedang djalan2 jang masih koerang daripada baik, kebanyakan didjalan sadja oleh pendoedoek negeri jang masih memakai pakaian tjaranja. Ditepi-tepi pantai dekat kota masih amat kotornja dan ta'teratoer, katjoeali didjembatan tempat kapal2 berlaboeh jang kelihatan beriboe-riboe kaoem Kromo (koeli) sedang bekerdja goena mentjahari penghidoepannja dengan anak dan isterinja.”⁵⁵

Kesenjangan yang tampak jelas, baik dalam kualitas lingkungan maupun ketersediaan fasilitas umum, menjadi salah satu konsekuensi dari proses modernisasi Kota Makassar. Seiring bertambahnya jumlah kaum terdidik, isu pemerataan pembangunan serta pemajuan hak-hak masyarakat Tionghoa dan

⁵⁴ Theodora Benson, *In the East My Pleasure Lies*, dalam George Miller, *Indonesia Timoer Tempo Doeloe 1544-1992*, (Depok: Komunitas Bambu, 2012) hlm. 236

⁵⁵ *Pemberita Makassar*, “1914-1924”, 21 Januari 1924

Bumiputra semakin sering disuarakan. Aspirasi ini kerap diwujudkan dalam bentuk tulisan di berbagai macam surat kabar yang diterbitkan dalam Kota Makassar.

Salah satu contoh yang menggambarkan kondisi tersebut dapat ditemukan dalam tulisan “WRS” berjudul “1914–1924” yang dimuat di *Pemberita Makassar*. Tulisan ini menyoroti nasib buruh dan pemilik usaha di Makassar yang mengalami kesulitan ekonomi akibat wabah serta persaingan dengan perusahaan besar.⁵⁶ Seperti yang diungkapkan WRS, “... djalan bangsa Makassar dalam hal keperluan hidoep (economie) makin lama makin moendoer meskipoen saja tahoe keadaan kota jang ditolong oleh ilmoe techniek selaloe berkembang.” Gambaran lain mengenai dampak modernisasi dapat ditemukan dalam tulisan “EVOLUTIE” berjudul “Kaindahan Kota Makassar, dan Pemandangan jang Ngeri...”, yang juga terbit di *Pemberita Makassar*. Dalam tulisannya, EVOLUTIE mengkritik pemerintah kota yang, meskipun telah membangun berbagai fasilitas seperti kelistrikan dan pengairan, tetap mengabaikan penderitaan masyarakat Bumiputra, khususnya mereka yang menderita penyakit kusta dan dibiarkan untuk berkeliling meminta-minta karena tidak mendapatkan perawatan yang layak.⁵⁷

⁵⁶ WRS menyebutkan bahwa para buruh meninggalkan pekerjaan di desa untuk menempuh pendidikan dan mencari peluang kerja di kota, yang dianggap menawarkan kesempatan baru. Namun, wabah yang melanda Makassar pada 1918-1919 telah melemahkan perekonomian, dan mengakibatkan banyak pekerja dipecat. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan besar di kota mampu memproduksi barang dalam jumlah besar, lebih cepat, dan konsisten berkat penggunaan mesin-mesin modern. Kondisi ini membuat banyak usaha lokal kesulitan bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan besar tersebut.

⁵⁷ *Pemberita Makassar*, “Kaindahan Kota Makassar, dan Pemandangan jang Ngeri...”, 22 Juni 1920

Selain lewat tulisan, aspirasi kelompok intelektual ini juga diwujudkan melalui pembentukan dan aktivitas berbagai organisasi yang mewakili kepentingan kelompok, seperti *Sarekat Islam (SI)*, *Shiong Tih Hui*, *Timorsche Verbond*, dan *Perserikatan Celebes*, yang memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial dan politik, sebagaimana akan dibahas pada bagian selanjutnya.

2.2.2. Sekolah dan Masyarakat Kota

Sekolah di Kota Makassar dapat dilihat pertama kali bermula dari upaya Dr. Benjamin Frederik Matthes yang mendirikan *Kweekschool* (Sekolah Guru) pada 1876 guna mendidik para calon guru. Dalam sekolahnya itu terdapat sekitar 20 orang yang mengemban pendidikan, dan kebanyakan dari mereka merupakan keluarga dari bangsawan. Pada 1880, pemerintah kemudian mengambil alih *Kweekschool* dan menjadikannya sebagai lembaga resmi pendidikan dari pemerintah.⁵⁸ Selain daripada kemunculan *Kweekschool*, sekolah dan pendidikan di Makassar sendiri tidak mengalami perkembangan yang baru pada 2 dekade terakhir abad ke-19.⁵⁹ Baru pada 1900 sebuah sekolah Tionghoa didirikan atas inisiatif dari Lie Leang dengan nama *Tiong Hoa Hak Tong (THHT)*.⁶⁰ *Tiong Hoa*

⁵⁸ Muchlis Paeni, Et.al, *Sejarah Sosial Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984) hlm. 101-102.

⁵⁹ Mandeknya pengembangan sekolah dan pendidikan di Makassar ini tidak terlepas dari perhatian pemerintah yang lebih terfokus pada usaha-usaha penaklukan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan serta adanya pandangan negatif di masyarakat yang menganggap bahwa dengan memasuki lembaga pendidikan milik pemerintah kolonial, maka mereka kemudian akan di Belandakan dan menjadi budak pada kepentingan kolonial (lihat Sarkawi B. Husain, *Sejarah Sekolah Makassar, Di Tengah Kolonialisme, Pertumbuhan Pers, dan Pembentukan Elit Baru*, (Makassar: Innawa, 2015) hlm. 5-6).

⁶⁰ Wirawan, *Sejarah Masyarakat Tionghoa.....*, hlm. 158-159.

Hak Tong terdiri dari dua bangunan yang lokasinya terpisah. Bangunan pertama berada di *Middlestraat* yang dikhususkan untuk murid laki-laki, sementara bangunan kedua berada di *Tempelstraat* dan diperuntukan untuk murid perempuan.

Pada awal abad ke-20, melalui penerapan Politik Etis, sekolah-sekolah mulai dibangun pada berbagai daerah di Hindia Belanda, termasuk salah satunya Makassar.⁶¹ Sama seperti pembagian wilayah pemukiman yang di dasarkan pada ras dan status sosial, sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah kolonial juga turut membagi-bagi tingkatan sekolahnya.⁶² Di Kota Makassar bagi anak-anak Melayu, Bugis, serta Makassar pada tahun 1904 dibangun dua Sekolah Kelas Dua atau yang dikenal sebagai *Tweedeschool* di *Butungweg* dan *Justitielaan* yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Gedung *Tweedeschool* kedua yang berada di *Justitielaan* kemudian diubah menjadi *Indlandsche School* atau yang sering disebut “Sekolah Melayu” pada 1905. Sementara satu tahun kemudian *Holland Ambonsche School* (HAS) dibangun untuk memberikan pendidikan bagi orang-orang Ambon yang banyak menjadi shuerdadu dari Belanda. Bagi anak-anak Tionghoa disediakan sebuah sekolah khusus yang dibangun pada 1907 dengan nama *Hollandsche Chinese School* (HCS) di *Timorweg*. Baik HAS maupun HCS menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Di kampung-kampung kota dibangun pula sekolah-sekolah yang dikenal sebagai

⁶¹ Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial yang memerlukan tenaga-tenaga Bumiputra terdidik guna menunjang kebutuhan administrasi pemerintahan yang semakin meluas seiring dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah (lihat Husain, 2015:2-3).

⁶² Husain, *Sejarah Sekolah Makassar.....*, hlm. 53-56

Volksschool (Sekolah Rakyat) dengan durasi pendidikan selama tiga tahun. Tujuannya untuk memberikan masyarakat di kampung kemampuan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung.⁶³

Pada 1916, barulah orang-orang Bumiputra Makassar mendapatkan sekolah dengan bahasa pengantar Belanda yang dikenal sebagai *Holland Inlandsche School* (HIS). HIS sendiri banyak diisi oleh anak-anak para bangsawan dan pegawai pemerintahan yang dapat menyanggupi biaya sekolah yang mahal. Memasuki dekade ketiga abad ke-20 sekolah-sekolah semakin banyak didirikan. Pada 1920 HCS mendirikan gedung sekolah keduanya, sementara untuk lulusan dari *Volksschool* didirikan sekolah sambungan yang dinamai *Vervolgschool* di tahun yang sama. Sekolah kelanjutan bagi para lulusan HIS, HCS, dan HAS yakni MULO dan OSVIA juga dibuka pada 1920 dan 1921 di Kota Makassar.⁶⁴ Pasca pendirian berbagai sekolah ini, tingkat masyarakat yang melek huruf mulai meningkat secara perlahan. Melalui sensus yang dilakukan pada 1920, sekitar 7.984 jiwa atau 3,72% masyarakat Bumiputra Kota Makassar terdata sebagai orang yang melek huruf.⁶⁵ Dalam jangka 10 tahun, tingkat melek huruf di masyarakat kemudian meningkat hingga mencapai 30.020 jiwa atau 4,61% dari total populasi.⁶⁶

⁶³ Sarita Paliwoy, Et.al, *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1981) hlm. 56-57

⁶⁴ Paliwoy, Et.al, *Sejarah Pendidikan Daerah...*, hlm. 59

⁶⁵ Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989) hlm. 69

⁶⁶ Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar*, hlm. 69

Pembukaan berbagai jenis sekolah di Makassar membawa pengaruh signifikan bagi kehidupan masyarakat kota. Pendidikan yang awalnya dirancang pemerintah kolonial untuk mencetak tenaga kerja penopang administrasi justru melahirkan kelompok intelektual yang memicu munculnya pemikiran dan gerakan baru di berbagai wilayah Hindia Belanda. Partai politik serta beragam organisasi kebangsaan, keagamaan, dan profesi mulai bermunculan untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi mereka melalui tulisan, pidato, mosi, hingga aksi pemogokan. Organisasi seperti *Sarekat Islam*, *Muhammadiyah*, *Partai Komunis Indonesia* (PKI), dan *Partai Nasional Indonesia* (PNI) mulai mendirikan cabang dan menggaet anggota. Adapula masyarakat kota yang memilih untuk mendirikan organisasi dan perkumpulan tersendiri seperti *Ashshiratal Mustaqim*, *Timorsche Verbond*, dan *Partai Selebes*.

Maraknya kemunculan berbagai perkumpulan dan organisasi pada awal abad ke-20 ini turut tercermin dalam dunia pers dan percetakan Makassar. Perkumpulan dan organisasi menjadikan percetakan dan penerbitan sebagai sebuah alat komunikasi ke masyarakat sehingga memiliki pandangan atau cara pikir yang sama dengan mereka. Dekade 1920-an hingga 1930-an menjadi periode waktu yang penting bagi kemunculan berbagai percetakan dan surat kabar dari perkumpulan dan organisasi di Hindia Belanda.⁶⁷ Kota Makassar juga turut dipenuhi oleh beragam organ percetakan dan penerbitan, serta tulisan-tulisan yang mewakili berbagai kelompok dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda, sebagaimana akan diuraikan pada bab selanjutnya.

⁶⁷ Farid, *Perang Suara: Bahasa*, hlm. 51

BAB III
DUNIA PERCETAKAN DAN SURAT KABAR DI KOTA